

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	Tribunnews.com
Media Cetak	

Ragam Aksi Pemprov DKI Antisipasi Banjir di Bawah Arahan Pj. Gubernur Heru

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Mochamad Dipa Anggara

Sebagai provinsi yang berada di dataran rendah dan dilintasi 13 sungai, DKI Jakarta rawan banjir. Dampak perubahan iklim, seperti anomali curah hujan yang semakin tinggi, menambah risiko [bencana banjir di Jakarta](#).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dipimpin [Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono](#) menempuh berbagai upaya untuk menanggulangi banjir.

Heru menginstruksikan kepada [Dinas Sumber Daya Air \(SDA\) Provinsi DKI Jakarta](#) dalam pembangunan infrastruktur, pengerahan petugas ke titik strategis, hingga skema terintegrasi penanganan banjir. Pembangunan sarana fisik menjadi metode penanganan banjir. Sistem polder maupun waduk mengintegrasikan saluran drainase, kolam retensi, serta pompa air yang dikendalikan dalam satu pengelolaan.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas SDA Provinsi DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum menyatakan, pihaknya masih membangun Waduk Rawa Malang di Jakarta Utara dengan progres pembangunan lebih dari 77 persen.

Selain itu, Dinas SDA DKI juga telah menyelesaikan pembangunan polder/kolam retensi di Tanjung Barat dan Gandaria, Jakarta Selatan.

"Kemudian terdapat lima polder atau pompa yang sedang dibangun tahun ini, yaitu polder atau pompa Sunter C, Gaya Motor, Kali Sepatan (Kawasan Berikat Nusantara/KBN), Ikatan Koperasi Pegawai Negeri (IKPN), dan RW 13 Greenville, Jakarta Barat," kata Ika dari keterangannya, Selasa (3/9/2024).

Sementara, revitalisasi dilakukan di dua lokasi pompa, yaitu pompa stasioner Jalan Tanjung Duren Raya-Jalan Letjen S. Parman, Jakarta Barat, dan pompa stasioner Taman BMW, Jakarta Utara.

Selain Waduk Rawa Malang, terdapat enam pembangunan waduk atau embung lanjutan, yaitu Waduk Marunda, Waduk Dukuh 2, Waduk Munjul, Waduk Cilangkap, Embung Kaja, serta Embung Pekayon. Menurut Ika, pembangunan waduk maupun polder yang dibangun pemerintah sudah sesuai dengan kebutuhan.

Waduk Rawa Malang sisi barat memiliki luas area basah kurang lebih 15.150 meter persegi, dengan kedalaman waduk mencapai 3,7 meter.

Sedangkan sisi timur memiliki luas area basah sekitar kurang lebih 11.030 meter persegi, dengan kedalaman waduk mencapai 3,7 meter.

"Bila pembangunan selesai pada tahun ini, ditargetkan dapat secara relatif mempercepat surut genangan yang terjadi di kawasan Rawa Malang, Jakarta Utara. Kemudian Jalan Raya Lenteng Agung, Jalan Raya Nangka dan Tanjung Barat, serta Jalan Arteri Pondok Indah di Jakarta Selatan," jelas Ika.

Selain menata dan membangun infrastruktur, tambah Ika, dinas juga rutin mengeruk kali, waduk, dan saluran air, sehingga kapasitas saluran tetap optimal dalam menampung air. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan genangan saat hujan turun.

Optimalisasi sarana dan prasarana pengendali banjir juga terus dilakukan dengan menyiagakan rumah pompa, pintu air, alat berat, serta pemeliharaan atau perawatan agar dapat bekerja secara maksimal, sebelum maupun saat penanganan banjir.

Terdapat 580 unit pompa stasioner yang tersebar di 202 lokasi dan 557 unit pompa mobile yang tersebar di lima wilayah kota administrasi.

Menambah PJLP

Sementara itu, Anggota DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh periode 2024-2029 mengaku, telah memberikan rekomendasi kepada Dinas SDA Provinsi DKI Jakarta dalam penanganan banjir. Rekomendasi itu disampaikan saat dia masih menjabat Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 lalu.

Salah satu rekomendasinya agar melaksanakan pembangunan infrastruktur sesuai aspirasi masyarakat dalam reses anggota DPRD.

Di samping itu, ia juga merekomendasikan Dinas SDA DKI agar menambah Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), untuk mengelola polder dan waduk.

Sebab, sampai saat ini jumlah polder dan waduk yang ada di Jakarta kurang selaras dengan jumlah PJIP yang bekerja.

"Apabila sudah pensiun, segera ditambah agar infrastruktur yang terbangun dapat terawat dan manfaatnya berkelanjutan," tutur Nova.

Sedangkan Direktur Eksekutif Jakarta Monitoring Network (JMN), Ahmad Sulhy, menyetujui skema terintegrasi penanganan banjir melalui pembangunan waduk atau polder oleh [Pemprov DKI Jakarta](#).

Penanganan banjir itu, lanjutnya, harus tuntas sebagian besar pada akhir 2024. Hal tersebut mengingat musim kemarau akan segera berakhir dan bakal memasuki musim hujan.

Menurut Ahmad, rencana [Pemprov DKI Jakarta](#) melalui Dinas SDA bisa diiringi dengan perbaikan tingkat konsolidasi yang terpusat dalam antisipasi serta penanganan banjir.

Dia berharap, antar instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, seperti Dinas SDA, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), bahkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) semisal PAM Jaya dan PAL Jaya, terbangun sinergi pengelolaan 13 aliran sungai yang melintasi Jakarta.

"Jadi, selain banjir, yang ditangani juga air kotor dan air bersih. Karena hal ini harus tersedia untuk menjadikan Jakarta 100 persen kota layak huni," imbuh Ahmad.